

# Tabloid Kontan

9 Februari - 15 Februari 2015  
No. 20 - XIX, 2015 KTNM150209

www.kontan.co.id

Rp 12.000

**HSBC Outlook 2015:  
Strategi Jitu Investor Hadapi Tahun 2015**

13

**EASTSPRING INVESTMENTS  
ASIA AT THE CORE**



**ASIA'S LARGEST RETAIL  
ASSET MANAGER FOR  
3 YEARS IN A ROW\***

\* Berdasarkan Asia Asset Management Fund Manager Survey tahun 2012-2014  
\* EASTSPRING INVESTMENTS SECURITIES MENGENAI KEWAJIBAN MENYUSUN PERUSAHAAN YANG BERKAWALAN SAMA SAMA, BUKAN LAH DAN DIBAWA OLEH KEWAJIBAN YANG BERKAWALAN SAMA.  
eastspring.co.id

**Bisnis**

**Ekspor Ban Terancam Kempes**  
Asosiasi ban risan vonis kartel gemboskan pasar ekspor. **8-9**

**Saham**

**Mencetak Gol di Saham Operator Jalan Tol**  
Prospek investasi di saham emiten jalan tol. **14-15**

**Manajemen**

**Astragraphia Xprins Pilih Merangkul Teknologi**  
Teknologi dipakai untuk mempercepat layanan. **H. 26-27**

**Keuangan**

**Asuransi Berlomba Buat Produk Mirip BPJS**  
Asuransi melihat masih ada celuk pasar potensial. **H. 32-33**



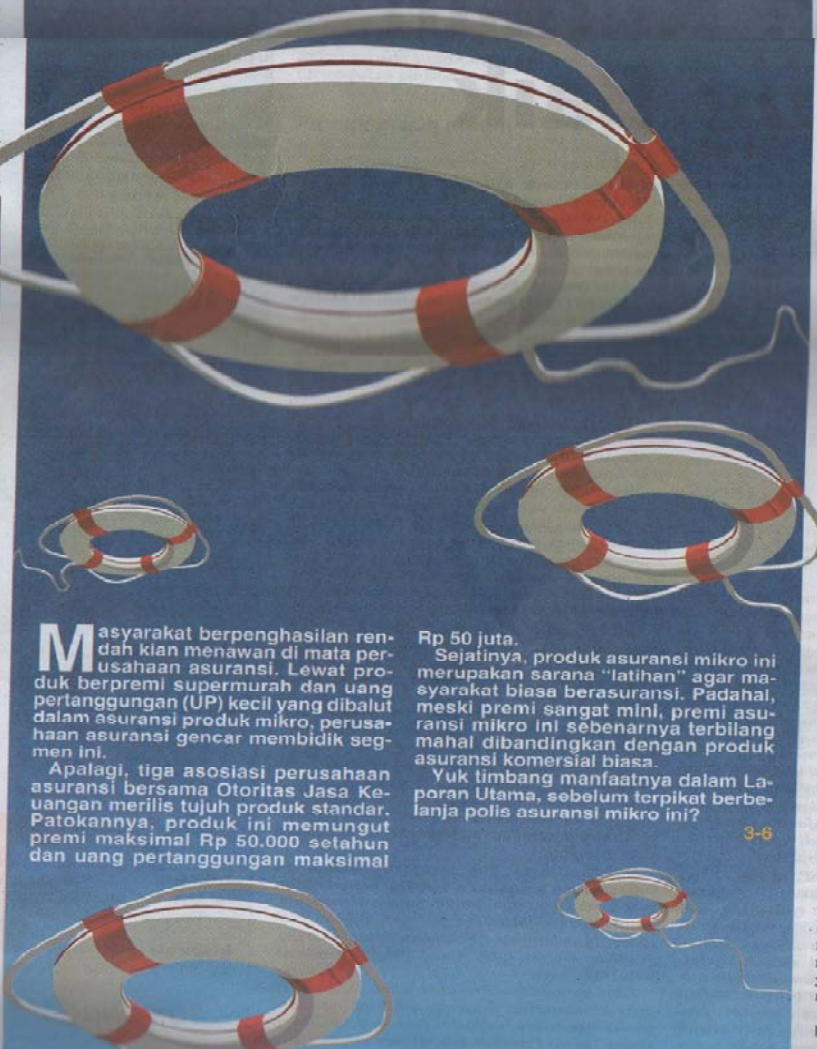
## Panjang Pasar Kabel

Bagi mereka yang sanggup menggontorkan dana belasan miliar rupiah untuk modal awal berbisnis, pabrik kabel layak dipertimbangkan. Perkembangan teknologi menjaga permintaan kabel tetap tinggi. Pasar kabel terentang dari sektor korporasi hingga rumah tangga. Produsen lokal juga bisa merambah pasar di luar negeri. Kendati pasarnya luas, pemain baru di bisnis ini perlu cermat memilih segmen sejak awal.

20-21

# Asuransi Premi Mini, Pentingkah?

Menyikapi banjir tawaran asuransi berpremi mini



**M**asyarakat berpenghasilan rendah kian menawan di mata perusahaan asuransi. Lewat produk berpremi supermurah dan uang pertanggungan (UP) kecil yang dibalut dalam asuransi produk mikro, perusahaan asuransi gencar membidik segmen ini. Apalagi, tiga asosiasi perusahaan asuransi bersama Otoritas Jasa Keuangan merilis tujuh produk standar. Patokannya, produk ini memungut premi maksimal Rp 50.000 setahun dan uang pertanggungan maksimal

Rp 50 juta. Sejatinya, produk asuransi mikro ini merupakan sarana "latihan" agar masyarakat biasa berasuransi. Padahal, meski premi sangat mini, premi asuransi mikro ini sebenarnya terbilang mahal dibandingkan dengan produk asuransi komersial biasa. Yuk libang manfaatnya dalam Laporan Utama, sebelum terpikat berbelanja polis asuransi mikro ini?

3-6

## Tarik Ulur Suntikan Modal buat BUMN

Kesimpulan sementara DPR, tak sampai 10 BUMN yang layak menerima suntikan modal segar dari dari APBNP 2015.



**B**adan usaha milik negara (BUMN) menjadi anak emas pemerintah tahun ini. Tak hanya pemangkasan setoran dividen, pemerintah mengusulkan pemberian penyertaan modal negara (PMN) ke perusahaan pelat merah. Tidak tanggung-tanggung, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P) 2015 yang saat ini lagi digodok bersama DPR, total PMN yang diusulkan mencapai Rp 72,07 triliun. Duit itu akan mengalir ke 40 BUMN. Suntikan modal ke perusahaan milik negara itu untuk mendukung agenda prioritas nasional. Misalnya, peningkatan kedaulatan pangan lewat program swasembada pangan, pengadaan benih, dan peningkatan produksi ikan nasional. Lalu pembangunan infrastruktur dan maritim, seperti pengembangan bandara dan pelabuhan, pengadaan kapal, dan penyelesaian proyek tol TransSumatra. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bila mendapat lampu hijau dari DPR, PMN tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah republik ini. Masalahnya, 14 BUMN yang bakal mendapat PMN akuntabilitasnya diragukan. Hasil audit BPK mengungkap inefisiensi di tubuh 14 BUMN itu yang bisa merugikan negara hingga Rp 3,15 triliun. Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, kesimpulan awal DPR, banyak BUMN yang tidak layak mendapatkan suntikan modal negara. Bahkan, jumlah BUMN yang layak mendapat PMN kurang dari 10 perusahaan. Jadi, akan berapa BUMN kelak mendapat suntikan PMN?



didaya dan dirawat dengan baik bisa tumbuh 70%. Tapi, jika dikembalikan ke alam, ditaruh di seluruh laut di Indonesia, tetap saja probabilitas hidupnya hanya 0,01%. Bayangkan. Ini yang saya katakan, aturan ini tidak sesuai keadaan.

**KONTAN:** Tapi, kata Ibu Menteri, di negara lain cara restocking ini berhasil?

**WAJAN:** Tergantung bagaimana perawatannya karena tidak mudah merawat lobster. Apalagi, ada proses alam.

**KONTAN:** Memang, seberapa banyak sih, ekspor lobster dari ke negara mana saja?

**WAJAN:** Ekspor bibit lobster mencapai tujuh juta ton sampai delapan juta ton per tahun. Itu diekspor di antaranya ke Vietnam untuk dibudidayakan di sana. Nah, di negara itu yang hidup selama budidaya mencapai 70%.

Idena Ibu Menteri, kan, tidak seperti itu, tapi disebar lagi, dikembalikan ke alam. Karena tidak diurus, tidak dikasih makan, tidak dijaga, maka lobster-lobster yang bisa hidup hanya sedikit sekali.

**KONTAN:** Kalau ekspor lobster yang bukan bibit?

**WAJAN:** Kecil sekali. Sekarang eksportnya masih 300 ton per tahun. Kalau tujuh juta ton bibit 70% di antaranya hidup selama dibudidayakan, maka lobster yang tumbuh ada 4,9 juta ton hingga 5 juta ton.

### Industri budidaya di Indonesia tidak kompetitif. Belum ada infrastruktur yang mendukung.

**KONTAN:** Terus, kalau memang hasilnya lebih bagus, kenapa malah diekspor, bukan dibudidayakan di sini?

**WAJAN:** Karena industri budidaya di Indonesia tidak kompetitif. Belum ada infrastruktur yang mendukung untuk mengembangkan budidaya. Berbeda dengan yang ada di Vietnam. Di negara itu pemerintahnya sudah aware soal budidaya laut. Maknanya, di sana bibit seperti lobster bisa berkembang dan bisa menghasilkan lobster dewasa lebih banyak lagi.

**KONTAN:** Artinya, pemerintah kita seharusnya mengembangkan industri budidaya laut seperti di Vietnam?

**WAJAN:** Iya, kalau pemerintah memang ingin mengembangkan budidaya laut Indonesia, bukan dengan cara restocking. Karena cara itu tidak akan meningkatkan secara signifikan produksi lobster.

Menurut saya, restocking pekerjaan sia-sia. Para nelayan di pesisir sangat mengetahui apa yang terjadi di laut sana. Maknanya, selama ini mereka memilih untuk ekspor bibit dibanding dengan restocking.

**KONTAN:** Apa saja yang perlu pemerintah siapkan untuk membangun industri budidaya laut di Indonesia?

**WAJAN:** Pemerintah perlu memberi rangsangan agar pelaku bisnis mau membangun industri budidaya laut. Mulai dari insentif, membuat teknologi

budidaya yang murah, hingga membikin pakan untuk lobster. Di Vietnam sudah ada dan bisa menjalankannya. Industri budidaya lobster dan ikan laut lain di Indonesia memang belum secanggih di luar negeri seperti Vietnam. Maknanya, pemerintah perlu menyiapkan ini, bukan malah dengan cara membatasi ataupun melarang seperti yang ada di Permen Nomor 1.

**KONTAN:** Saat ini perkembangan industri budidaya lobster di Indonesia?

**WAJAN:** Ada tetapi masih sangat kecil sekali jumlahnya. Dibanding langsung mengekspor bibit, budidaya tidak kompetitif. Selama ini hanya 15% bibit lobster yang terserap oleh industri budidaya di Indonesia. Maknanya, butuh insentif untuk membangun industri budidaya laut di sini.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melakukan upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya lobster. Caranya, dengan pengendalian dan pemanfaatan induk lobster serta menginisiasi beberapa area penangkaran bibit sebagai kawasan konservasi.

**KONTAN:** Apakah sudah menghitung kerugian akibat pembatasan penangkapan sekaligus ekspor lobster?

**WAJAN:** Kalau dihitung kerugiannya mencapai Rp 220 miliar per tahun. Bandingkan dengan tingkat keberhasilan dari restocking yang sedang dijalankan pemerintah. Ini yang tidak dipikirkan oleh pemerintah.

**KONTAN:** Perairan mana yang paling banyak mengandung bibit lobster?

**WAJAN:** Paling banyak di NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua daerah ini penghasil lobster terbesar.

**KONTAN:** Asosiasi akan melakukan gugatan terhadap Permen Nomor 1?

**WAJAN:** Kami meminta Ibu Menteri untuk meninjau kembali aturan itu. Sejauh ini, sih, Ibu Menteri mendengarkan para stakeholder yang terjun langsung ke bisnis ini.

**KONTAN:** Kabarnya pemerintah juga akan membatasi pemangkaran ikan kerapu?

**WAJAN:** Kami belum mengetahui detailnya. Namun, yang kami dengar larangan itu hanya berlaku bagi bibit kerapu yang diproduksi unit pelaksana teknis (UPT) KKP dan bukan untuk swasta. Selama ini bibit kerapu dari hatchery backyard dan hatchery swasta boleh diekspor. Jadi, tidak ada dampak ke pelaku usaha perikanan.

**KONTAN:** Benarkah pelaku usaha perikanan juga menolak Permen No. 57/2014 yang melarang bongkar muat (transshipment) di tengah laut?

**WAJAN:** Buat pembudidaya kerapu, aturan itu membuat mereka tidak bisa lagi melakukan ekspor. Sebab, ekspor dengan pengiriman via udara berbiaya terlalu tinggi. Padahal, pembudidaya kerapu mengekspor 4.600 ton per tahun dengan nilai US\$ 45 juta. Produksi kerapu tersebar dari Maluku Utara, Maluku Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Sumatra, hingga Kepulauan Natuna. Produksi dan ekspor kerapu juga merupakan sumber devisa kita dan juga menghidupi lebih dari 100.000 kepala keluarga. □

## Analisis Ekonomi

# Urgensi PMN untuk BUMN



Toto Pranoto,  
Managing Director Lembaga  
Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Indonesia

Beberapa waktu lalu, pemerintah dan DPR sepakat untuk penambahan penyertaan modal negara (PMN) ke 33 badan usaha milik negara (BUMN), dengan nilai mendekati Rp 48 triliun.

Banyak pro dan kontra yang timbul terkait kebijakan tersebut. Pihak yang kontra mempertanyakan besarnya PMN dikaitkan dengan keterbatasan dana pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), terutama untuk menggenjot sektor infrastruktur. Mereka juga mempertanyakan kualifikasi BUMN yang menerima PMN, apakah cukup kompetitif dan mampu mengembangkan korporasi. Atau, justru PMN tersebut akan habis untuk menambal kebutuhan operasional rutin BUMN.

Sementara, pihak yang pro dengan kebijakan itu mendorong PMN segera bisa dilaksanakan untuk mendorong daya saing BUMN, terutama, dengan telah direalisasikan ASEAN Connectivity di 2015.

Data pada akhir 2014 menunjukkan, 141 BUMN memiliki nilai aset total mencapai Rp 4.000 triliun dan nilai penjualan (sales) sekitar Rp 1.775 triliun. Ini memperlihatkan indikator kinerja keuangan yang relatif tidak mengembirakan. Sebab, kemampuan dalam menciptakan laba terbeling rendah, yaitu sekitar Rp 161 triliun. Adapun kontribusi pajak tahun 2013 sekitar Rp 130 triliun dan pembayaran dividen Rp 40 triliun.

Angka-angka ini memperlihatkan, bahwa kemampuan keseluruhan BUMN dalam pengelolaan aset (produktivitas) relatif rendah, sehingga kemampuan untuk menciptakan laba juga rendah. Di samping itu, terjadi *pareto condition*, di mana 25 BUMN terbesar menghasilkan 90% total penjualan perusahaan pelat merah.

Dengan *benchmark* kinerja seperti itu, apakah kira-kira urgensi penambahan PMN kepada BUMN? *Pertama*, tentunya adalah penambahan daya saing bagi BUMN. Penambahan modal ini paling tidak bisa meningkatkan *leverage* BUMN sampai 70%, sehingga kebutuhan investasi dan ekspansi bisnisnya bisa lebih terpenuhi.

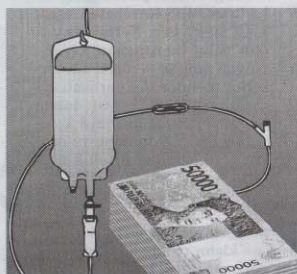
Bayangkan, misalnya, bagaimana PT Bank Mandiri Tbk dengan nilai aset US\$ 68 triliun per tahun 2013 bisa bersaing di pasar ASEAN kalau nilai asetnya jauh tertinggal dibanding DBS, Singapura, yang mencapai US\$ 320 miliar. Bahkan, Maybank, Malaysia, juga memiliki aset yang lebih besar yakni senilai US\$ 171 miliar. Sebab itu, peningkatan aset ini tentu punya korelasi kuat dengan peningkatan modal. Sayangnya, rencana PMN sebesar Rp 5,6

triliun ke Bank Mandiri pada 2015 ini kelihatannya belum mendapat persetujuan DPR.

Pun nilai PMN ke PT Angkasa Pura II sebesar Rp 3 triliun akan membantu perusahaan meningkatkan daya saing dalam era *open sky policy*, sebelum ekspansi bisnis dilakukan anak usaha sejenis yang dimiliki Khasanah atau Temasek di Indonesia. Demikian pula PMN ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 3,75 triliun, diyakini mampu meningkatkan kinerja perusahaan ini terutama angkutan barang. Sehingga, upaya penurunan biaya logistik nasional mulai bisa dijalankan.

*Kedua*, alasan yang logis penambahan PMN kepada BUMN untuk mencegah dilusi saham

### Kebijakan PMN yang tepat sasaran diharapkan bisa mendorong kinerja BUMN.



milik pemerintah. Sudah sangat jelas rencana *rights issue* oleh PT Adhi Karya Tbk, PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, dan PT Waskita Karya Tbk di 2015 akan berpotensi mengurangi kepemilikan saham pemerintah. Alhasil, opsi PMN ke BUMN menjadi langkah yang tepat.

### Pertanyaan kritis

Tapi, beberapa pertanyaan kritis perlu ditelaah terkait kebijakan PNM ini. *Pertama*, apa-

kah penambahan PMN di BUMN yang dianggap industri strategis, seperti bidang maritim, transportasi laut, dan galangan kapal akan mampu mendorong kinerja mereka?

Secara historis, kinerja keuangan perusahaan pelat merah tersebut relatif kurang memuaskan. Bahkan, beberapa di antaranya pernah masuk sebagai pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Apakah kajian tuntas (*due diligence*) sudah dilakukan terhadap mereka secara komprehensif?

Siapa tahu masih diperlukan tindakan restrukturisasi bisnis terhadap perusahaan itu. Selain itu, mengukur kemampuan direksi sebelum kemudian PMN tersebut direalisasikan.

*Kedua*, bagaimana monitoring terhadap PMN yang akan disalurkan? Ini juga menyangkut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan adanya temuan-temuan bernisalah di 14 BUMN dari 33 perusahaan yang diusulkan mendapatkan PMN.

Temuan masalah yang signifikan hasil pemeriksaan BPK atas tahun 2009-2014 tersebut belum ditindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK. Berdasarkan surat Nomor 20/S/IX-XX/01/2015 yang diterbitkan BPK, terdapat inefisiensi dari 14 BUMN itu sebesar Rp 3,15 triliun dan US\$ 243.896. Serta, terdapat 86 rekomendasi yang belum selesai dijalankan.

Hal ini tentu harus mendapat perhatian serius, supaya kebijakan PMN tidak menjadi sia-sia. BUMN-BUMN yang tidak patuh terhadap rekomendasi perbaikan dari BPK secara menahuri, mungkin, bisa dipertimbangkan untuk dicoret saja sebagai penerima PMN.

Namun, upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing BUMN dengan menciptakan *value creation* melalui sinergi BUMN tentu akan mudah dicapai bila jumlah BUMN tidak terlalu banyak. Pemberian PMN kepada 33 BUMN mengesankan upaya pemerintah yang masih sporadis dalam upaya pembenahan perusahaan negara ini.

Misalnya, sudah ada *holding company* BUMN sektor perkebunan, maka suntikan dana ke *holding* mungkin lebih baik dibanding ke masing-masing PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Sebab, *holding* sudah memiliki *business plan* yang menyeluruh terhadap bisnis PTPN, sehingga lebih paham sektor mana yang perlu diprioritaskan.

Pada akhirnya, kebijakan PMN yang tepat sasaran diharapkan bisa mendorong kinerja BUMN. Sehingga, total setoran pajak dan dividen bisa ditingkatkan untuk kesejahteraan negara dan rakyatnya. □